

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan lebih untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, otonomi daerah dapat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya, menetapkan kebijakan, serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri.

Menurut Prakosa (2004), untuk mendanai semua aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, dana yang digunakan berasal dari dana perimbangan yakni dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pemerintah pusat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Menurut Mardiasmo (2004:155), umumnya DAU diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menutupi pendanaan ataupun untuk pemenuhan kebutuhan daerah yang kurang akibat PAD yang kurang. Namun pada kenyataannya daerah malah terlalu bergantung kepada DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan belanja pemerintah daerah.

Tapi bagaimana jika dalam pelaksanaannya, dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang salah satunya merupakan DAU tersebut tidak digunakan dengan semestinya oleh pemerintah daerah, misalnya untuk kepentingan golongannya sendiri. Maka yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara kehidupan para pengelola pemerintahan tersebut dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan daerahnya dalam mengelola keuangan daerah, maka setiap laporan keuangan pemerintah daerah yang datanya juga berisi mengenai PAD, DAU, dan belanja daerah akan diaudit oleh BPK dan hasilnya akan menjadi penilaian mengenai daerah tersebut bagaimana pemerintahnya mengelola keuangan daerahnya.

Dari data yang dipublikasikan oleh BPK terkait masalah hasil opini audit pada daerah di Pulau Jawa, terdapat kenaikan belanja daerah untuk daerah yang pada tahun sebelumnya mendapat opini audit yang baik dan penurunan belanja untuk yang mendapatkan hasil audit yang buruk. Dari hasil tersebut, penulis memiliki anggapan bahwa ketika opini mengenai laporan keuangan yang didapat pemerintah daerah itu buruk, maka dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk tahun berikutnya akan berkurang sehingga dapat mempengaruhi kegiatan belanja daerah itu juga, begitu pula sebaliknya.

Setiap daerah selalu ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan pada akhirnya segala upaya dilakukan untuk memperoleh opini tersebut meskipun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, hasil opini audit berupa wajar tanpa pengecualian belum dapat

menjadi tolak ukur apakah suatu daerah terbebas dari penyalahgunaan wewenang termasuk wewenang untuk mengelola keuangan daerah yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Sondi (2011), dalam artikel yang ditulis di situs ekonomi.kompasiana.com juga menyatakan hal yang sama bahwa “informasi yang termasuk dalam laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP masih mungkin mengandung kesalahan namun kesalahan tersebut tidak mengakibatkan pengambilan keputusan yang berbeda. Opini WTP bukan berarti laporan tersebut tidak ada korupsi atau tidak ada mark up belanja atas laporan keuangan tersebut”.

Dari penjelasan singkat tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang adanya pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap belanja pemerintah daerah, khususnya pengaruh hasil opini audit periode tersebut terhadap belanja daerah periode selanjutnya. Sebagian penelitian ini adalah penelitian ulang dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Prakosa (2004), yang menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah. Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adanya penambahan variabel baru yakni hasil opini audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah serta sampel dari penelitian ini yang hanya dalam lingkup daerah Jawa dan periode APBD yang diteliti lebih baru dari penelitian sebelumnya yakni realisasi APBD periode 2009 - 2010.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PAD tahun berjalan (2010) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah tahun berjalan (2010)?
2. Apakah PAD tahun lalu (2009) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah tahun berjalan (2010)?
3. Apakah DAU tahun berjalan (2010) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah tahun berjalan (2010)?
4. Apakah DAU tahun lalu (2009) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah tahun berjalan (2010)?
5. Apakah hasil opini audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun lalu (2009) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah tahun berjalan (2010) ?
6. Apakah PAD, DAU, dan hasil opini audit BPK tahun lalu (2009) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah tahun berjalan (2010)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh PAD tahun berjalan (2009) terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa pada tahun berjalan (2010).
2. Pengaruh PAD tahun lalu (2009) terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa pada tahun berjalan (2010).
3. Pengaruh DAU tahun berjalan (2010) terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa pada tahun berjalan (2010).
4. Pengaruh DAU tahun lalu (2009) terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa pada tahun berjalan (2010).
5. Pengaruh hasil opini audit BPK tahun lalu (2009) terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa pada tahun berjalan (2010).
6. Pengaruh PAD, DAU, dan hasil opini audit BPK tahun lalu (2009) terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa pada tahun berjalan (2010).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai pengaruh jumlah PAD, DAU dan baik atau buruknya hasil opini audit BPK terhadap belanja pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk lebih mengelola daerahnya dengan baik

dan tidak terlalu menargetkan perolehan opini yang baik dengan menggunakan segala cara.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta data tambahan untuk melakukan penelitian yang sama ataupun mengembangkannya menjadi penelitian yang lebih baik lagi.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini. Meliputi teori mengenai DAU, PAD, hasil opini audit, dan Belanja Daerah. Pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah baik secara parsial maupun secara simultan baik pada tahun berjalan maupun untuk periode selanjutnya, pengaruh hasil opini audit terhadap belanja daerah tahun selanjutnya. Selain itu juga terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung sehingga menjadi acuan dalam penentuan hipotesis.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian-uraian, deskripsi dan gambaran secara umum obyek penelitian serta metodologi yang digunakan dalam penelitian, diantaranya mulai dari teknik pengumpulan data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

Bab 4 Analisa Dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis pengaruh DAU, PAD, dan hasil opini audit BPK terhadap belanja pemerintah daerah dan pembahasan atas hasil analisis dari hipotesis yang telah diungkapkan sebelumnya.

Bab 5 Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan penulis terhadap hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam pengujian hipotesisnya, serta saran yang diungkapkan penulis sebagai bentuk untuk mengajak para pembacanya agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini ke arah yang lebih baik lagi.